

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kontroversi di Internal Dewan

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera dibubarkan. Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dan langsung melakukan pembelaan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, TGUPP bentukan Gubernur Anies Baswedan tak transparan dalam pelaporan kinerja dan anggaran. Sementara, pendanaannya terus meningkat.

Terlebih, sambung Gembong, usulan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp19 miliar menjadi Rp26,5 miliar dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020 ■

Gembong menyatakan, kenaikan anggaran TGUPP sia-sia, mengingat tidak ada dampak kinerja tim bentukan Anies itu kepada masyarakat.

"Maka sebaiknya anggaran TGUPP didrop saja, walaupun tetap harus ada TGUPP maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional gubernur, sehingga tidak membebani APBD," ujar dia kepada INDOPOS saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).

Ia pun menyindir soal transparansi kinerja dan pertanggungjawaban TGUPP yang disebutnya hanya diketahui oleh gubernur, bukan masyarakat. Padahal, TGUPP menghabiskan anggaran yang banyak sekali dari APBD DKI.

Menurut dia, setiap penggunaan uang rakyat dalam APBD harus dipertanggungjawabkan ke DPRD. Tercatat, Anggaran TGUPP pada APBD-Perubahan 2019 mencapai Rp18,9 miliar.

Anggarannya kemudian meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp19,8 miliar. Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya direvisi menjadi Rp16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP meraup Rp19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBDP DKI 2019 menjadi Rp18,99 miliar.

"Yang jelas memang enggak kelihatan, yang tahu hanya gubernur. Pertanggungjawaban gubernur, dia (TGUPP-red) langsung enggak ada laporan pertanggungjawaban ke DPRD," cetus Gembong.

"Minimal secara tertulis yang pasti fraksi PDI-Perjuangan beranggapan manfaatnya tidak terlalu signifikan maka anggaran TGUPP lebih baik drop," tambah dia.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya. Dia juga meminta agar TGUPP dibubarkan. Menurut dia, anggaran Rp21 miliar sangat boros dengan pengadaan anggota TGUPP.

"Iya menurut saya pemborosan. Bubarkan saja kalau outputnya tidak ada dan tidak bisa diawasi," ungkap dia saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi melakukan pembelaan. Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan, penilaian kinerja TGUPP tidak bisa diukur seperti bangunan atau melalui fisiknya. Sebab, TGUPP merupakan pembantu gubernur dalam merumuskan kebijakan.

"TGUPP ini hati dan otaknya gubernur. Karena dia akan memberikan masukan seperti dalam bidang kesehatan, masalah pantai Utara misalnya. Sesuai dengan bidang-bidangnya," imbuh Suhaimi kepada INDOPOS saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).

Karena tugasnya tersebut, sambung Suhaimi, maka kinerja TGUPP tidak bisa dilihat langsung. Kinerja TGUPP bisa dilihat dari pencapaian yang telah dilakukan gubernur, terutama pemenuhan 23 janjinya dan realisasi program di Rencana Pembangunan Jangka Mene-

ngah Daerah.

"Jika 23 janji dipenuhi dengan baik dan masyarakat puas merupakan pencapaiannya. Soal gaji besar dan kecil itu relatif. Tapi dilihat hasilnya," jelas dia.

Lebih jauh Suhaimi menuturkan, anggaran TGUPP memang lebih baik menggunakan APBD langsung, ketimbang operasional gubernur. Alasannya, dengan menggunakan APBD anggaran yang dikeluarkan lebih terukur dan transparan.

Selain itu, dengan dianggarkan APBD, TGUPP tidak bisa dikendalikan orang lain. "Misalnya dibiaya dari pihak-pihak lainnya, maka itu bisa dikendalikan oleh orang-orang," tandas dia.

"Kalau dianggarkan APBD jadi ada ukurannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan orang-orang yang digaji APBD," tambah dia.

Dari data yang dihimpun, selama era Anies gaji TGUPP selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pemerintah menganggarkan TGUPP Rp 16,02 miliar dan meningkat menjadi Rp18,9 miliar pada 2019.

Sedangkan di 2020, Bappeda telah merevisi anggaran yang tertuang di plafon anggaran tahun depan dari Rp26,5 miliar menjadi Rp21,22 miliar untuk TGUPP. Adapun diketahui bahwa untuk gaji ketua TGUPP mencapai Rp51,5 juta per bulan.

Sedangkan, untuk ketua bidang Rp 41,4 juta, anggota tingkat satu Rp 31,7, anggota tingkat dua Rp 26,5 dan anggota tingkat tiga Rp 15,3 juta per bulan. (aen)